



PENGELOLAAN RETRIBUSI PASAR DALAM MENINGKATKAN PENDAPATAN ASLI DAERAH PADA MASA PANDEMI COVID 19 (Suatu Studi di PD. Pasar Baruga Kota Kendari)

Samrin Madu, L.M Bariun, Muhammad Tahir

Fakultas Hukum Universitas Sulawesi Tenggara

ARTICLE INFO

Keywords:

Covid 19 Pandemic,
Local Original Income,
Market Retribution,
Pd. Baruga Market,
Kendari City.

e-mail:

samrin98@gmail.com

Corresponding Author:

Samrin Madu

Received:02/01/2024

Accepted:21/05/2024

Published:31/10/2024



ABSTRACT

The study aims to determine how market levies are managed in Kendari City and to determine the economic perspective on the management of market levies in increasing regional original income. Determining the location of the study is very important in order to be accountable for the data obtained. For this reason, the researcher chose a location at PD. Pasar Baruga, Kendari City. Research results (1) Management of market levies at the UPTD Pasar Baruga which is under the auspices of PD. Pasar Kendari City which is not yet optimal because the target for market levy revenue that has been set has not been achieved even though the realization of market levies in Kendari City has increased every year. This is due to various obstacles such as the outbreak of the Covid 19 pandemic and the lack of incentives for data collection of mandatory levies, market revitalization, arrears in payment of levies by traders for various reasons, holidays and weather factors so that the realization of market levy revenue does not reach the target and the management of market levies implemented by PD. Pasar Kendari City according to the economic perspective is in market levy activities in accordance with the wishes of the local government, namely that market levy officers have good morals towards traders as mandatory levies. Market retribution officers are polite when collecting retribution from traders. There are still many market retribution management systems that need to be improved, so that with market retribution management that is in accordance with government expectations, the target for market retribution revenue will be achieved, so that it can increase regional original income from market retribution.

I. PENDAHULUAN

Kita ketahui bahwa Covid- 19 ini memberikan dampak yang sangat berpengaruh bagi masyarakat. Dampak ini sangat terasa pada sektor Ekonomi, pada awal masa Covid-19 muncul di Indonesia mengalami penurunan dalam hal ekonomi hingga saat inipun masih terjadi. Terutama pada pasar-pasar tradisional, sejak adanya penerapan pembatasan-pembatasan pada awal Covid-19 para

pedagang mengalami penurunan pendapatan yang saat ini masih terjadi. Hal ini juga dari Dampak Pandemi Covid-19 sangat mempengaruhi dari pengelolaan atau penarikan Retribusi dari Pedagang sehingga tidak memaksimalkan pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar Mengalami Penurunan.

Otonomi Daerah memang dapat membawa perubahan positif di daerah dalam hal kewenangan daerah untuk mengatur diri sendiri. Perubahan pola hubungan yang terjadi antara pusat dan daerah sejak diberlakukannya otonomi daerah memberikan implikasi yang cukup signifikan, antara lain dalam pengelolaan keuangan yang dilakukan oleh daerah otonom akibat dijalankannya desentralisasi. Kebijakan Pemerintah Daerah pada masa Pandemi Covid-19 sekarang ini memberikan kepada pemerintah daerah untuk memaksimalkan kegiatan perekonomian dengan memperhatikan protokol kesehatan. Aktivitas Perdagangan Pasar Tradisional tetap dilakukan sebab pasar tradisional adalah tempat yang paling dibutuhkan oleh masyarakat untuk mendapatkan suatu kebutuhan pokok yang ada sehari-hari.

Pendapatan Asli Daerah (PAD) yaitu pendapatan yang diperoleh daerah dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah, yaitu pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dan lain-lain.

Dalam upaya meningkatkan pendapatan asli daerah untuk membiayai pelaksanaan pembangunan di Kota Kendari, pemerintah telah melaksanakan berbagai bentuk retribusi daerah, salah satu bentuk retribusi daerah tersebut adalah mengenai retribusi pelayanan pasar yang diatur Keputusan Wali Kota Kendari No. 661/2014 Tentang Perubahan

1. Perubahan dan penyesuaian pengenaan pungutan tarif jasa pelayanan pasar Type A dan Type B wilayah Kota Kendari.
2. Perubahan atas lampiran keputusan Wali Kota No. 661 Tahun 2014 Tentang Tarif Jasa sewa Tempat Berjualan Usaha dari 1.500 menjadi 2000.
3. Keputusan Direktur PD Pasar Kota Kendari No. 910/220/S.KEP/PDP/IX/2014 Tentang Pengenaan Dan Penetapan Biaya penerbitan STBHPTU (sertifikat tanda bukti hak pemakaian tempat usaha) pasar type B dalam lingkup PD Pasar Kota Kendari.

Salah satu sumber pendapatan asli daerah antara lain adalah retribusi pasar. Dengan demikian perlu adanya perhatian dari semua pihak baik unsur pemerintah maupun masyarakat sebagai wajib retribusi dalam menyikapi bagaimana melakukan pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang ada sehingga betul-betul dapat memberikan kontribusi terhadap peningkatan pendapatan asli daerah. Sebagaimana pengelolaan pemungutan retribusi pasar tidak terlepas dari fungsi manajemen. Menurut George R. Terry terdapat 4 fungsi utama manajemen, yang manajemen dikenal sebagai POAC, yaitu Planning (perencanaan), organizing (pengorganisasian), actuating (penggerakan atau pelaksanaan), dan controlling (pengawasan). Dengan memanfaatkan baik ilmu maupun seni agar dapat menyelesaikan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya. Maka perlu ditunjang dengan manajemen atau pengelolaan secara optimal, karena manajemen dibutuhkan oleh organisasi dalam mencapai tujuan.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Pengertian Pengelolaan

Pengelolaan merupakan istilah yang dipakai dalam ilmu manajemen secara etimologi pengelolaan berasal dari kata “kelola” (to manage) dan biasanya merujuk pada proses mengurus atau menangani sesuatu untuk mencapai tujuan mengelola berasal dari kata “mengelola” yang dapat diartikan dalam bentuk mengerjakan, mengurus, dan menyelenggarakan kegiatan atau yang lebih dikenal dengan istilah manajemen. Pengelolaan sama dengan prinsip manajemen yang berkaitan dengan 4 aspek manajemen yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan dan pengawasan

serta pemanfaatan sumber daya termasuk sumber daya manusia untuk mencapai suatu tujuan organisasi.

Pendekatan manajemen merupakan suatu keniscayaan apalagi jika dilakukan dalam suatu organisasi atau lembaga. Dalam organisasi yang rapi, akan dicapai hasil yang lebih dari pada yang dilakukan secara individual. Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik. Organisasi apapun, senantiasa membutuhkan manajemen yang baik.

Kelembagaan itu akan berjalan dengan baik jika dikelola dengan baik. Organisasi apapun senantiasa membutuhkan manajemen yang baik. Jika setiap perilaku orang yang terlibat dalam sebuah kegiatan dilandasi dengan nilai tauhid maka diharapkan perilakunya akan terkendali karena menyadari adanya pengawasan dari yang maha tinggi Pendapatan Asli Daerah.

Nurul Huda menjelaskan dalam konsep Islam, pemenuhan kepentingan sosial merupakan tanggungjawab pemerintah, pemerintah bertanggungjawab untuk menyediakan, memelihara dan mengoperasikan public utilities (pelayanan publik) untuk menjamin terpenuhinya kepentingan sosial. Merupakan lembaga formal yang mewujudkan dan memberikan pelayanan yang terbaik kepada semua rakyatnya. Pemerintah mempunyai segudang kewajiban yang harus dipikul demi mewujudkan kesejahteraan masyarakat, salah satunya bertanggungjawab terhadap Perekonomian.

B. Pengertian Retribusi Pasar

Dalam ilmu ekonomi, pengertian pasar memiliki arti yang lebih luas dari pada hanya sekedar tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk mengadakan transaksi jual beli barang. Pengertian pasar tidak harus dikaitkan dengan suatu tempat yang disebut pasar dalam pengertian sehari-hari. Keberadaan pasar merupakan salah satu indikator paling nyata dari kegiatan ekonomi masyarakat di suatu wilayah.

Pasar mencakup keseluruhan permintaan dan penawaran, serta seluruh kontak antara penjual dan pembeli untuk mempertukarkan barang atau jasa. Pada umumnya pasar adalah suatu transaksi jual beli melibatkan produk/barang atau jasa dengan uang sebagai alat transaksi pembayaran yang sah dan disetujui oleh kedua belah pihak yang bertransaksi.

Retribusi Pasar adalah fasilitas pasar tradisional/ sederhana berupa peralatan, kios yang dikelola pemerintahan daerah, dan khusus disediakan untuk pedagang, tidak termasuk yang dikelola oleh dan pihak swasta. Retribusi pelayanan pasar adalah pungutan sebagai pembayaran atas penggunaan, pemakaian dan pemanfaatan kios, kios atau toko dikawasan pasar dan tempat pedagang umum yang disediakan oleh pemerintah daerah. Jenis pasar yang dapat dikenakan retribusi pelayanan pasar meliputi pasar umum dan pasar hewan.

Retribusi dipungut dengan menggunakan Surat Ketetapan Retribusi Daerah (SKRD) atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya pokok retribusi. Dokumen lain yang dipersamakan antara lain berupa karcis, kupon dan kartu langganan. Tata cara pelaksanaan pemungutan retribusi ditetapkan oleh kepala daerah. Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kadaluwarsa dapat dihapuskan. Penghapusan penagihan retribusi daerah provinsi dan piutang retribusi daerah Kabupaten/Kota yang sudah kadaluwarsa dilakukan dengan keputusan yang masing-masing ditetapkan oleh Gubernur dan Bupati/Walikota. Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kadaluwarsa diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Retribusi pasar memiliki subjek dan objek yaitu:

- a. Subjek Retribusi Pasar
- b. Objek Retribusi Pasar

Administrasi penerimaan retribusi yang baik menurut Devas (1988:144) adalah sebagai berikut:

- a. Menentukan wajib retribusi, hal ini berkaitan dengan kejelasan objek retribusi sehingga mempersempit bagi wajib retribusi untuk menyembunyikan objek retribusinya.
- b. Objek retribusi pasar adalah pelayanan fasilitas pasar yang di miliki dan atau di kelola pihak swasta maupun perusahaan daerah. Objek retribusi pasar yaitu:
 - 1) Objek retribusi pasar adalah penyediaan fasilitas pasar tradisional/sederhana ,berupa pelataran ,los ,kios,yang di kelola pemerintah daerah ,dan khusus di sediakan untuk pedagang .
 - 2) Di kecualikan dari objek retribusi pelayanan pasar yang di kelola oleh BUMN,BUMD dan pihak swasta .

C. Pengertian Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang di pisahkan, dan pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dan pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan atas desentralisasi.

Pendapatan asli daerah menurut Abdul Halim adalah merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah ,yaitu pajak daerah ,retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang di pisahkan dan lain-lain. Sedangkan pendapatan asli daerah menurut Aries Djaenuri adalah penerimaan yang di peroleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayah sendiri yang di pungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan Yang berlaku.

Dari pengertian di atas dapat di simpulkan bahwa pendapatan asli daerah adalah pendapatan yang di peroleh dari sumber-sumber ekonomi dalam wilayahnya sendiri yang di atur berdasarkan peraturan perundang-undangan. Sumber pendapatan asli daerah terdiri dari retribusi daerah hasil pengelolaan kekayaan yang di pisahkan dan lain-lain pendapatan asli daerah. Sumber-sumber pendapatan asli daerah ini digali sesuai dengan potensi dan kemampuan daerah masing-masing.

a. Pajak Daerah

Pajak daerah sebagai salah satu pendapatan hasil daerah di harapkan menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan daerah ,untuk meningkatkan dan memeratakan kesejahteraan masyarakat.meskipun beberap...;a jenis pajak daerah sudah ditetapa dalam Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000,daerah kabupaten/kota di beri peluang dalam menggali potensi sumber-sumber, keuangannya dengan menetapkan jenis pajak selain yang telah di tetapkan sepanjang memenuhi kriteria yang telah di tetapkan,dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Pajak daerah dibagi menjadi 2 bagian yaitu:

- 1) Pajak Provinsi terdiri dari:
 - a) Pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
 - b) Bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air;
 - c) Pajak bahan bakar kendaraan bermotor;
 - d) Pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan.
- 2) Pajak Kabupaten/Kota terdiri dari:
 - a) Pajak Hotel;
 - b) Pajak Restoran;
 - c) Pajak Hiburan;
 - d) Pajak Reklame;
 - e) Pajak Penerangan Jalan;
 - f) Pajak Pengambilan Bahan Galian Golongan C;

g) Pajak Parkir.

b. Retribusi Daerah

Retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Sumber pendapatan daerah yang penting lainnya adalah Retribusi Daerah. Retribusi Daerah memiliki ciri-ciri sebagai berikut:

- 1) Retribusi dipungut oleh Pemerintah Daerah.
- 2) Dalam pungutan retribusi terdapat prestasi yang diberikan kepada daerah yang secara langsung dapat ditunjuk.
- 3) Retribusi dikenakan kepada siapa saja yang memanfaatkan jasa yang disediakan Pemerintah Daerah.

Banyak jenis retribusi daerah, tetapi dapat dikelompokkan menjadi tiga macam sesuai objeknya. Tiga macam retribusi daerah yaitu:

- a. Retribusi Jasa Umum
- b. Retribusi Jasa Usaha
- c. Retribusi Pelayanan Tertentu
- d. Hasil Pengelolaan Kekayaan Yang Dipisahkan
- e. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah Yang Sah

D. Pengertian Otonomi Daerah

Pengertian otonomi daerah secara etimologi berasal dari kata autonomus atau otonomia (yunani) yang berarti "Keputusan sendiri" (self ruling). Otonomi dapat mengandung pengertian antara lain: kondisi atau ciri untuk tidak dikontrol oleh pihak lain; atau bentuk pemerintahan sendiri (self government), yaitu hak untuk memerintah atau menentukan nasib sendiri (the right of self government) atau self determination. Dengan demikian otonomi bermakna kebebasan dan kemandirian daerah dalam menentukan langkah-langkah sendiri.

Koesomahatmadja berpendapat bahwa, perkembangan sejarah di Indonesia, otonomi selain mengandung arti perundangan (regeling) juga mengandung arti pemerintah (bestuur). Lebih jauh literatur Belanda menjelaskan bahwa otonomi berarti pemerintahan sendiri (Zelfregeling) yang oleh van vollenhoven dibagi atas membuat undang-undang sendiri (zelfwetgeving), melaksanakan sendiri (zelfuitvoering), mengadili sendiri (zelfrechtpraak), dan menindak sendiri (zelfpolitie).

Sedangkan J. Wajong mendefinisikan otonomi daerah sebagai kebebasan untuk memelihara dan memajukan kepentingan khusus daerah dengan keuangan sendiri, menentukan hukum sendiri dan berpemerintahan sendiri. Sementara itu, Ateng Syarifuddin mendukung pandangan Wajong, tetapi penekanannya pada kebebasan dan bukan kemerdekaan. Namun kebebasan itu terbatas karena merupakan perwujudan dari pemberian kesempatan yang harus dipertanggung-jawabkan. Secara formil, berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 1 ayat 6 disebutkan bahwa: "otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia".

E. Pengertian Pemerintahan Daerah

Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Dari penjelasan tersebut dapat diketahui bahwa pemerintah memberi kewenangan kepada masing-masing daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya agar penyelenggaraan kepentingan umum dapat terlaksana sesuai dengan tujuan Negara.

Mengenai norma hukum, menurut Hans Kelsen (Yuliandri, 2009:21) adalah aturan, pola, atau standar yang perlu diikuti. Kemudian dijelaskan lebih lanjut bahwa fungsi norma hukum, adalah: (a) memerintah (gebeiten); (b) melarang (verbeiten); (c) menguasai; (ermachtigen); (d) membolehkan (erlauben); dan (e) menyimpan dari ketentuan (derogoreen). Yuliandri (2009:21), menulis norma hukum pada hakekatnya juga merupakan unsur pokok dalam peraturan perundang-undangan. Dalam kepustakaan eropacontinental, mengenai apa yang dimaksud dengan peraturan perundang-undangan atau wet in materiele zin, gasetz in materiellen sinne mengandung tiga unsur pokok: pertama, norma hukum (rechtsnormen); kedua, berlaku keluar (naar buiten warken); dan ketiga, bersifat umum dalam arti luas (algemeenheid in ruime zin), sifat-sifat norma hukum dalam peraturan perundang-undangan dapat berupa ; perintah (gebod); larangan (berbod), pengizinan (toestemming), dan pembebasan (vrijstelling).

Jimly Asshiddiqie (2009:490), mengatakan lembaga negara terkadang disebut dengan istilah lembaga pemerintahan, lembaga pemerintah non-departemen, atau lembaga Negara saja. Ada yang dibentuk berdasarkan atau karena di beri kekuasaan oleh undang-undang dasar ,ada pula yang di bentuk dan mendapatkan kekuasaannya dari undang-undang, dan bahkan ada pula yang hanya di bentuk berdasarkan keputusan presiden. hirarkir atau rengking kedudukannya tentu saja tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku . Lembaga negara yang di atur dan di bentuk oleh UUD merupakan organ konstitusi, sedangkan yang di bentuk berdasarkan jimly Asshiddiqie. 2005.hukum tata negara dan pilar-pilar demokrasi jakarta :konstitusi press.

Undang-undang merupakan organ UU, sementara yang hanya di bentuk karena keputusan presiden, tentunya lebih rendah lagi tingkatan dan derajat diperlukan hukumnya terhadap pejabat yang dudk di dalamnya .demikian pula jika lembaga di maksud dibentuk dan di beri kekuasaan berdasarkan peraturm daerah (perda), tentu lebih rendah lagi tingkatannya.dan mengenai oraganisasi negara ada dua unsur pokok yang saling berkaitan , yaitu organ dan fungsi adalah isinya;organ adalah status bentuknya, sedangkan functie adalah gerakan wadah itu sesuai maksud pembentukannya .

Pemerintah sebagai organisasi dari negara yang menjalankan fungsi dalam lingkungan jabatan memiliki wewenang tentu memberikan kekuasaan untuk melakukan tugasnya .jabatan-jabatan tersebut adalah jabatan eksekutif, jabatan legislative, dan jabatan yudikatif, yang di artikan sebagai pemerintahan dalam arti luas, dan untuk jabatan eksekutif disebut pemerintahan dalam arti sempit .kekuasaan yang melekat pada lingkungan jabatan harus ada pemangku jabatan sebagai yang menjalankan pemerintahan dan ini yang disebut pemerintahan. Dalam setiap penyelenggaraan pemerintahan dan kenegaraan asas legalitas merupakan salah satu prinsip utama dalam negara hukum. kemudian asas legalitas ini di gunakan dalam bidang administrasi negara yang memiliki makna," dat het bestuur aan de wet is onderwoerpen "(bahwa pemerintah tunduk kepada undang-undang) Ridhwan HR (2008:95). Oleh karena itu undang-undang di jadikan sebagai sendi utama penyelenggaraan kenegaraan dan pemerintah. secara normatif, prinsip bahwa setiap tindakan pemerintah harut berdasarkan pada kewengan ini memang di anut setiap negara hukum. asas legalitas berkaitan berat dengan gagasan demokrasi dan gagasan negara hukum, dimana gagasan demokrasi menuntu setiap bentuk undang-undang dan berbagai keputusan mendapatkan persetujuan dari wakil rakyat danf sebanyak mungkin memerhatikan kepentingan rakyat.

Dalam konteks hal tersebut akan wewenang pemeritntahan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Ridhwan HR (2008:103-109) secara teoritas di peroleh melalui tiga cara

yaitu atribusi, delegasi dan mandat. Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintahan yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Di sini di lahirkan atau di ciptakan suatu wewenang baru. Lebih lanjut disebut bahwa legislator yang berkompeten memberikan atribusi wewenang pemerintahan itu di bedakan antara: (a) yang kedudukan sebagai original legislator di negara kita di jadi tingkat pusat adalah MPR sebagai bentuk konstitusi dan DPR bersama-sama pemerintah sebagai yang melahirkan satu undang-undang, dan tingkat daerah adalah DPRD dan pemuda yang melahirkan peraturan daerah; (b) yang bertindak sebagai delegated legislator, seperti presiden yang berdasar pada suatu ketentuan undang-undang mengeluarkan peraturan pemerintah di mana menciptakan wewenang pemerintahan kepada badan atau jabatan tata usaha negara tertentu.

III. METODE PENELITIAN

Penetapan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diperoleh. Untuk itu peneliti memilih lokasi di PD Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari. Jenis data yang digunakan adalah primer dan sekunder yang berasal dari field research dan Library research. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dan dokumentasi dan menganalisis secara kualitatif.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Data Informasi Unit Pasar Baruga

I. Identitas pasar	
- Nama pasar	: Unit Baruga
- Alamat Pasar	: Jl. Pasar Baruga
- Kelurahan/Desa	: Baruga
- Kecamatan	: Baruga Kota Kendari
- Kabupaten/kota	: Kota Kendari
- Provinsi	: Sulawesi Tenggara
II. Lahan dan Bangunan Pasar	
Luas Lahan Pasar : 17.674 m ²	
- Status Kepemilikan Lahan	: Milik Pemkot Kendari
- Dokumen Kepemilikan Lahan	: Bersertifikat
- Luas Bangunan	: 14.500 m ²
- Tahun Bangunan Pasar	: 1999/2000
- Kondisi Bangunan Pasar	: Baik (setelah Revitalisasi)
- Jumlah Kios	: 307 petak
- Jumlah Lods	: 624 petak
- Jumlah Lapak	: 127 unit
III. Sarana dan Prasarana Pasar	
IV.	
- Kantor Pengelola	: PD. Pasar Kota Kendari Unit Pasar Baruga
- Kantor Fasilitas Pembiayaan	:
- Toilet/WC	: ada 3 unit
- Tempat Ibadah (musholah)	: ada
- Pos Keamanan	: ada bergabung dengan kantor pasar
- Tempat penampungan	: ada 1 unit bak sampah

sampah sementara	
- Area bongkar parkir	: ada
- Sarana air bersih	: ada
- Instalasi listrik	: ada (PLN)
- Komoditas yang tersedia	:A. Sandang
	1 pakaian jadi
	2 textile
	3 sepatu sandal
	:B. Pangan
	1 sentra sayuran dan buah-buahan
	2 sembako
	3 ikan basah dan kering
	4 ayam potong/kampung
	5 daging sapi
	6 aneka bumbu masa
	:C. Lain-lain
	1 elektronik
	2 kosmetik dan salon
	3 alat tulis kantor
4 bahan bangunan	
5 aksesoris	
- Sarana Transportasi Umum	:1 Angkuran kota jurusan pasar wua-wua pasar baruga. :2 Taksi dan ojek
- Jenis-jenis pelayanan	: Jasa Harian Jualan 1. Harian jualan kios 2. Harian jualan lods 3. Harian jualan pelataran
	: Jasa Pemakaian Kekayaan Daerah (PKD) Kios/ios
	: Jasa Bongkar
	: Jasa Listrik
	: Jasa MCK
	: Jasa Mesin Giling Dan Parut Kelapa
	: Jasa Administrasi Perpasaran
	IV. Operasional dan Pengelola Pasar
- Hari Pasar dalam seminggu	: 7 Hari

- Operasional pasar dalam sehari	: Sore sampai subuh
- Unit kerja pengelola pasar	: PD. Pasar Kota Kendari Unit Pasar Baruga
- Jumlah karyawan pengelola pasar	: 25 Orang

2. Latar Belakang

Pasar merupakan tempat bertemunya antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli, baik secara langsung maupun tidak langsung. Proses jual-beli merupakan bentuk hubungan interaksi sosial yang melibatkan dua belah pihak. Pasar merupakan pranata penting dalam kehidupan bermasyarakat baik dipedesaan maupun di perkotaan sebagai lembaga distribusi berbagai macam kebutuhan manusia dari bahan makanan, energi dan sumber daya lainnya.

Selama ini pasar berperan sebagai penghubung antara desa dan kota, perkembangan penduduk dan kebudayaan senantiasa diikuti perkembangan pasar. Hal ini dikarenakan hubungan interaksi sosial dalam memenuhi kebutuhan setiap manusia, kota membutuhkan kehadiran desa untuk menyuplai kebutuhan pangan dan kota memberikan pula kebutuhan desa berupa sandang dan papan. Kota Kendari sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Tenggara, memberikan andil yang sangat besar dalam pemenuhan kebutuhan penduduknya, letaknya yang sangat strategis sebagai penghubung antara daerah kabupaten lainnya di wilayah daratan Sulawesi Tenggara merupakan faktor pendukung menggairahkan dinamisasi perpasaran.

Kondisi pasar Kota Kendari yang masih terbilang sebagai pasar tradisional sering kali memberikan pencitraan yang kurang baik dimata masyarakat, karena kurang memperlihatkan dan memberikan pelayanan yang baik, aman dan nyaman bagi pembelil (pengunjung), serta kurang memberikan prestise yang mengikuti tren (gaya) hidup yang lebih mengikuti mode.

Perusahaan daerah pasar kota Kendari sebagai pengelola pasar dalam lingkup Kota Kendari dengan visi "MENJADIKAN PERUSAHAAN DAERAH PASAR YANG TERTIB, BERSIH, INDAH DAN NYAMAN DALAM MEMAJUKAN EKONOMI KERAKYATAN GUNA MENUJU KEMANDIRIAN PERUSAHAAN DAERAH" Berupa untuk memberikan pelayanan maksimal kepada seluruh masyarakat kota Kendari yang menjadikan pasar sebagai aktivitas sehari-hari. Untuk mewujudkan visi PD. Pasar kota Kendari tersebut diatas, maka dengan ini pengelola unit pasar BARUGA menyusun langkah-langkah strategis yang secara harfiah tertuang dalam perencanaan kerja hari ini.

3. Tujuan dan Manfaat

- Perencanaan kerja ini bertujuan untuk memberikan arah kegiatan kerja unit pasar Baruga. Sebagai upaya memberikan pelayanan maksimal kepada masyarakat pengguna pasar.
- Perencanaan kerja ini bermanfaat sebagai bahan monitoring dan evaluasi atas pencapaian pelaksanaan program kegiatan kerja unit pasar Baruga.

4. Kondisi dan Potensi Internal

Secara internal unit pasar BARUGA didukung dengan manajerial pengelola pasar sebagai berikut :

- Kepala unit pasar : 1 orang
- Staf administrasi : 1 orang
- Kolektor : 5 orang
- Satpam : 5 orang
- Kebersihan : 11 orang

- Pembina kamtib. TNI POLRI : 2 orang
- Jumlah : 25 orang

5. Kondisi dan Potensi External

Kondisi eksternal pasar Baruga adalah sebagai berikut:

- a. Bangunan pasar didirikan pada tahun 2002/2003 diatas lahan seluas 17.647 Ha. Dan merupakan hak milik pemerintah kota Kendari.
- b. Jenis dan jumlah bangunan dari:
 - 1) Kios permanen : 262 petak
 - 2) Kios semi permanen : 45 petak
 - Jumlah kios : 307
 - 3) Lods permanen ikan : 141 petak
 - 4) Lods semi permanen : 483 petak
 - Jumlah Lods : 624 petak
 - 5) Lapak/peralatan -/+ : 127 petak

6. Permasalahan, Prioritas dan Rutinitas yang di Hadapi

- a. Adapun permasalahan yang dihadapi unit pasar Baruga adalah sebagai berikut:
 - 1. Kondisis tepat berjualan masih banyak yang terbuat dari kayu dan papan yang secara kualitas tidak representatif mudah rusak dan keropos
 - 2. Kurangnya pemahaman atau kesadaran pedagang untuk memenuhi kewajibannya.
 - 3. Belum adanya sanksi tegas kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya.
 - 4. Sebagai pasar sentral bongkaran melakukan aktifitas pada sore hari hingga pagi hari sangat rentan dengan produksi sampah yang sangat besar dimana menimbulkan penumpukan sampah yang besar dan kondisi armada pengangkutan sampah yang ada.
 - 5. Areal tempat penampungan sampah tidak sebanding dengan volume sampah yang ada.
 - 6. Tidak adanya pagar pembatas, merupakan sumber kerawanan keamanan pada malam hari.
 - 7. Drainase/saluran air yang belum memadai untuk menampung aliran air saat hujan turun.
 - 8. Belum tertatanya pedagang berdasarkan jenis jualan.
 - 9. Adanya pedagang yang melakukan sewa dan pengalihan tas tempat berjualan tanpa sepengetahuan pengelola pasar.
- b. Prioritas

Adapun prioritas yang harus dilaksanakan sebagai berikut:

- 1. Secara berkesinambungan memberikan pembekalan kepada karyawan akan tupoksinya.
- 2. Secara berkesinambungan mensosialisasikan kepada pedagang agar senantiasa memenuhi kewajibannya sesuai dengan aturan-aturan yang berlaku dalam melaksanakan aktifitas berjualan didalam unit pasar.
- 3. Memberlakukan sanksi tegas kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan peraturan PD. Pasar Kota Kendari
- 4. Mengoptimalkan penerimaan/pendapatan jasa pelayanan pasar sesuai dengan potensi dan target yang telah ditetapkan oleh direktur PD. Pasar Kota Kendari
- 5. Secara berkala melaksanakan penataan dengan pendataan pedagang.
- 6. Buat buku database dan buku barang inventaris kantor unit pasar
- 7. Mengadministrasikan dan melatarkan secara mingguan dan bulanan realisasi aktifitas jasa pelayanan pasar.

c. Rutinitas

- 1. Melaksanakan penagihan jasa harian kios/lods dan pelataran.

2. Melaksanakan penagihan jasa tempat berjualan (PKD) dan tunggakan (PKD) kios/lods.
3. Melaksanakan penagihan MCK, listrik, parkir/bongkaran.
4. Melaksanakan pembinaan kepada pedagang yang tidak memenuhi kewajibannya.
5. Melaksanakan pemantauan pelaksanaan akan K.3 secara berkesinambungan.

7. Rencana Target Pencapaian

Sebagai pengelola aset daerah pada bidang perpasaran dalam hal jasa pelayanan pasar maka unit pasar Baruga berdasarkan potensi yang dimiliki menyusun rencana target pencapaian penerimaan jasa pelayanan pasar pada periode tahun 2020.

8. Proyeksi Kedepan

Berdasarkan rencana target penerimaan tersebut diatas, dalam upaya pencapaian target, pengelola unit pasar Baruga membutuhkan hal-hal sebagai berikut:

- a) Membutuhkan SDM yang betul-betul punya kemauan dan integritas serta etos kerja yang tinggi.
- b) Membutuhkan sarana dan prasarana penunjang dalam aktifitas perpasaran untuk lebih efektifnya memberikan pelayanan kepada pedagang (alat kebersihan dan lain-lain)
- c) Memaksimalkan pemberian jasa pelayanan kepada pedagang agar pedagang merasakan terlayani dengan keberadaan PD. Pasar khususnya jasa pelayanan K.3
- d) Meningkatkan pendapatan jasa pasar sehingga dapat meningkatkan kesejahteraan karyawan. (kenaikan gaji pokok secara berkala sesuai UMK dan menjadikan karyawan tetap PD. Pasar Kota Kendari)
- e) Menjadikan pasar tradisional sebagai sarana berbelanja dan wisata serta sarana unggulan dalam penggerak perekonomian kota Kendari.

B. Bentuk Pengelolaan Retribusi Pasar dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada PD. Pasar Baruga Kota Kendari.

Pengelolaan penerimaan retribusi pasar yang dalam hal ini dikelola oleh Perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari senantiasa menerapkan fungsi-fungsi manajemen dalam pengelolaannya agar dalam pelaksanaannya senantiasa merujuk pada upaya pencapaian tujuan organisasi. Bentuk pengelolaan yang terdapat 4 fungsi pengelolaan yaitu perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan. Fungsi pengelolaan yang diterapkan di perusahaan Daerah Pasar Kota Kendari yaitu :

1. Perencanaan

Perencanaan retribusi pasar yang direncanakan oleh Perusahaan Daerah Pasar yang merupakan implementasi keputusan Walikota Kendari berdasarkan hasil wawancara yaitu penentuan target penerimaan retribusi pasar di Kota Kendari serta pendataan wajib retribusi. Untuk mencapai tujuan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Kendari maka perlu adanya perumusan perencanaan dari PD. Pasar Kota Kendari. Perencanaan memegang peranan penting dalam upaya pencapaian tujuan yang ditetapkan dalam suatu organisasi.

Target penerimaan retribusi pasar merupakan tolak ukur realisasi penerimaan tahunan yang harus dicapai dalam realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Kendari, yaitu proses penentuan target penerimaan retribusi pasar yang ingin dicapai dalam satu tahun anggaran, yaitu terhitung mulai 1 Januari sampai 31 Desember.

Berdasarkan hasil wawancara Kepala UPTD Pasar Baruga mekanisme penentuan target pertahun didasarkan pada potensi yang dimiliki setiap pasar dan dengan melihat realisasi yang dapat dicapai tiap tahunnya serta menambah presentasi jenis penerimaan yang memungkinkan untuk dicapai

itulah yang menjadi acuan dari PD. Pasar Kendari untuk menetapkan target penerimaan retribusi pasar pertahun disetiap pasar. Tetapi dalam pelaksanaan dari perencanaan berkenaan dengan penentuan target terdapat kendala yaitu dalam penentuan target pertahunnya adalah tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang sebenarnya sehingga terjadi perbedaan antara target yang ditetapkan dengan realisasinya.

Berdasarkan hasil wawancara, penulis dapat menyimpulkan bahwa perencanaan dalam hal penentuan target penerimaan retribusi pasar pertahunnya senantiasa dilakukan berdasarkan potensi yang ada dan sangat tergantung pada realisasi pertahun yang dicapai. Namun karena tidak adanya data yang akurat tentang potensi yang dimiliki pasar, merupakan salah satu faktor yang membuat realisasi penerimaan retribusi pasar Kota Kendari tidak sesuai dengan yang direncanakan.

Menurut Bapak Samrin, Kepala Pasar Baruga mengatakan bahwa tidak tercapainya target biasanya disebabkan oleh banyak wajib retribusi yang tidak memiliki tempat khusus didalam pasar, khususnya bagian pelataran, jumlah mereka yang tidak menentu membuat kita kesulitan untuk mendata mereka. Dan kurangnya kesadaran mereka dalam membayar retribusi pasar.

Terdapat faktor yang menyebabkan tidak terealisasinya retribusi pasar di Kota Kendari setiap tahunnya seperti yang dijelaskan oleh Kepala UPTD Pasar Baruga mengatakan bahwa banyak faktor yang mempengaruhi pemasukan retribusi pasar, diantaranya yaitu faktor cuaca, jika hujan terus. Banyak pedagang yang tidak berdagang, terutama yang dipelataran, sehingga tidak ditarik retribusi, dan juga faktor lainnya seperti hari raya, maka banyak lpds/kios dan pelataran yang tutup beberapa hari dan revitalisasi atau pembangunan pasar, sehingga tidak ada aktivitas pemungutan retribusi selama revitalisasi pasar.

Setelah penulis wawancara dengan bapak Kepala Pd. Pasar Baruga Kota Kendari, penulis observasi kelapangan dengan mewawancarai langsung pedagang pasar dan petugas kolektor mengenai kegiatan pemungutan retribusi pasar. Menurut ibu Santi salah satu penjual Itas di Pasar Baruga Kec. Baruga mengatakan bahwa terkadang ia tidak membayar karcis, karena hubungan kekerabatan dengan petugas penagihnya, dan terkadang kalau membayar hanya setengah dari jumlah yang tertera pada karcis.

Salah satu petugas kolektor di pasar Baruga Ibu Arniati mengatakan bahwa kami dalam menagih retribusi kepada para pedagang, terkadang mereka tidak membayar retribusi dengan alasan dagangan mereka belum ada yang laku. Perencanaan yang diterapkan oleh PD. Pasar Kendari berdasarkan keputusan Walikota Kendari yaitu pendataan objek retribusi pasar di Kota Kendari, namun dalam pelaksanaannya masih dikatakan belum optimal. Karena berdasarkan data yang diperoleh penulis, data jumlah kios 307 Petak dan Lods berjumlah 624 yang ada di UPTD Pasar Baruga Kec. Baruga telah sesuai dengan apa yang ada dilapangan. Ini terbukti dari data yang diberikan oleh pihak PD. Pasar Kota Kendari jumlah kios disalah satu pasar yaitu pasar Baruga.

Dari keseluruhan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan, bahwa UPTD Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari mempunyai perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar yang berdampak pada peningkatan pendapatan asli daerah yaitu penentuan target dan pendapatan wajib retribusi namun dalam pelaksanaannya terdapat berbagai macam kendala, sehingga target penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target, padahal jika dilihat dari jumlah penjual yang ada dipasar serta kegiatan pasar yang terus-menerus tiap harinya begitu besar dalam meningkatkan PAD Kota Kendari, tetapi dalam kenyataannya malah tidak pernah mencapai target, hal ini karena kurangnya kesadaran eajib retribusi dan kurang tegasnya sanksi yang dikenakan oleh pihak instansi terkait dan masalah dalam internal organisasi serta faktor cuaca.

2. Pengorganisasian

Pengorganisasian merupakan fungsi pengelolaan yang diterapkan oleh UPTD Pasar Baruga Kec. Baruga Kota Kendari, keberadaan sumber daya manusia yang ada di UPTD Pasar Baruga merupakan komponen yang sangat menentukan. Pencapaian tujuan suatu organisasi akan dipengaruhi oleh kemampuan dan kekuatan sumber daya manusia yang ada didalamnya, disamping dipengaruhi oleh kemampuan pemimpin disetiap level untuk mengorganisir dan mengelola sumber daya yang ada dan juga perlu adanya peran intitusi yang dapat menjembatani antara wajib retribusi.

Dalam proses pelaksanaan pemungutan retribusi pasar maka diperlukan adanya sumber daya yang berhubungan dengan pemungutan, seperti sumber daya manusia yaitu petugas pemungut dan pengawas, metode yaitu cara yang digunakan dalam pemungutannya, standar kerja petugas serta sarana dan prasarana penunjang. Kesemua unsur tersebut merupakan unsur-unsur yang menunjang dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar.

Pengorganisasian pada PD. Pasar Kendari Kota Kendari yaitu mengenai sumber daya manusia. Suatu organisasi jumlah pegawai harus seimbang dengan jumlah pekerjaan dalam organisasi tersebut dengan maksud bahwa jumlah pegawai tidak berlebihan agar tidak terjadi pemborosan dan tidak kurang agar pekerjaan dapat terselesaikan dengan baik. Dari jumlah pegawai dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diketahui dari Kepala UPTD Pasar Baruga Kev. Baruga Kota Kendari mengatakan bahwa jumlah personil kita dilapangan sudah cukup memadai, sampai saat ini jumlah kolektor disetiap pasar berjumlah 5 oroang yang dilihat dari keadaan masing-masing yang setiap hari melakukan pemungutan retribusi pasar kepada para wajib retribusi dan saya rasa jumlah kolektor kita sudah cukup untuk melakukan pemungutan retribusi.

Selain itu, pengorganisasian yang diterapkan oleh UPTD nya masing-masing Pasar pembagian tugas. Agar pelaksanaan tugas berjalan dengan baik maka harus ada pembagian tugas yang baik agar dalam pelaksanaan pemungutan dapat berjalan dengan efektif dan lancar sehingga pemungutan retribusi pasar semua pedagang tidak ada yang tidak membayar retribusi seperti yang dikatakan oleh Bapak Sainal, petugas kolektor bahwa untuk lebih memudahkan pekerjaan kolektor kami membagi pekerjaan, para kolektor biasanya dibagi wilayah penagihan, karena setiap pasar terbagi dalam beberapa blok sehingga dapat memudahkan petugas dan aktivitas pemungutan retribusi dapat berjalan secara efektif dan efisien.

Sejalan dengan pendapat diatas ibu Arniati yang merupakan salah satu kolektor juga mengatakan bahwa dalam melakukan pemungutan retribusi pasar kami dibagi menjadi beberapa wilayah, ini sangat membantu kami dalam melaksanakan tugas karena dengan begitu kami mengetahui dengan jelas wilayah kami dalam melakukan pemungutan retribusi.

Untuk wajib retribusi yang tidak menetap pada suatu pelataran diprioritaskan pemungutan lebih awal seperti yang dikatakan oleh salah seorang kolektor bahwa dalam pemungutan retribusi pasar kami selalu mendahulukan pedagang-pedagang yang ada diluar pasar, yang ridak memiliki tempat khusus didalam pasar karena merekalah yang paling cepat pulangny sehingga kami melakukan pemungutan retribusi dengan mendahulukan pedagang yang tidak memiliki tempat khusus agar pedagang membayar retribusi sebelum mereka pulang.

Menurut Ibu Denti salah seorang penjual pakaian dipasar Baruga (wajib retribusi) mengatakan bahwa "pemungutan retribusi yang saya bayar selama ini tidak memberatkan, saya rasa sudah sesuai dengan fasilitas yang disediakan pemerintah, dan pembayarannya pun tidak menyulitkan, kami hanya membayar retribusi lalu petugas memberikan kami karcis dan sikap pemungut retribusinya juga baik-baik serta sopan, sehingga tidak memberatkan kami untuk membayar retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan bahwa pembagian tugas pemungutan retribusi pasar sudah sesuai dengan yang sebenarnya, tetapi harus lebih ditingkatkan lagi pengawasannya.

Pengorganisasian yang diterapkan pada PD. Pasar Kota Kendari terakhir yaitu menentukan standar kerja. Dalam upaya pencapaian target penerimaan maka dibuatlah standar kerja bagi kolektor retribusi pasar agar dapat melaksanakan pemungutan seefektif mungkin. Hal ini diungkapkan oleh Kepala UPTD Pasar Baruga mengatakan bahwa untuk kolektor pemungutan retribusi pasar dibuatkan suatu standar kerja yaitu jam mulai dan jam selesai kegiatan pemungutan retribusi tersebut. Beliau juga menambahkan terkadang juga ketidakdisiplinan para kolektor yang datang terlambat membuat banyak pedagang luput dari tagihan dan ini sangat mempengaruhi pemasukan utamanya dalam retribusi pasar.

Berdasarkan hasil wawancara diatas, penulis menyimpulkan bahwa standar kerja para kolektor pemungut retribusi sudah sesuai dengan aturan, namun kedisiplinan para kolektor ini masih harus ditingkatkan karena ini sangat berpengaruh terhadap realisasi penerimaan dimana tenaga kolektor sebagai unsur yang sangat dominan dalam menentukan keberhasilan dalam penerimaan retribusi pasar.

3. Pelaksanaan

Fungsi pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan PD. Pasar Kota Kendari yaitu pelaksanaan. Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan. Rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut retribusi pasar dengan menggunakan segala sarana dan prasarana yang ada untuk merealisasikan rencana tersebut.

Adapun bentuk pelaksanaan yang dilakukan oleh PD. Pasar Baruga sesuai dengan keterangan salah satu staf dari Perusahaan pasar yang mengatakan bahwa kami turun kelapangan disamping melakukan pengawasan pada proses pemungutan retribusi pasar, juga memberikan arahan kepada para kolektor agar menjalankan tugasnya dengan baik dan bertanggungjawab. Kemudian menurut Kepala UPTD di setiap Pasar tiap harinya terjun kelapangan untuk memantau para kolektor, apakah sudah melaksanakan tugasnya atau belum, sehingga dapat melihat siapa yang kinerjanya bagus, dan siapa yang setengah-setengah.

Dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di UPTD Pasar Baruga dilakukan setiap hari, adapun metode pelaksanaan pemungutan retribusi pasar sesuai dengan hasil wawancara Kepala UPTD pasar baruga bahwa dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar di Kota Kendari selama ini kolektor pemungut retribusi mendatangi langsung wajib retribusi, dengan memberikan karcis, sehingga wajib retribusi tidak perlu susah-susah mendatangi kami. Kemudian menurut kolektor pemungut retribusi sangatlah mudah dimana kita hanya mendatangi langsung wajib retribusi, dan menagih sesuai dengan yang tertera dalam karcis.

Sementara dari segi wajib retribusi mengatakan bahwa pembayarannya sangat mudah, petugas pemungut retribusi mendatangi kami, dan memberikan karcis yang sudah tertera berapa yang harus dibayar, dan pembayarannya pun sudah selesai dengan fasilitas yang diberikan. Berdasarkan hasil wawancara diatas dapat disimpulkan metode pemungutan retribusi pasar sangat mudah, yaitu hanya memberikan karcis kepada wajib retribusi sehingga wajib retribusi tidak perlu lapor mendatangi pos pemungutan retribusi. Dan dengan menggunakan karcis diharapkan tidak terjadi penyelewengan dalam hal pemungutannya, sehingga semua hasil dari pemungutan retribusi masuk ke kas dan menyetornya ke PD. Pasar Kota Kendari.

Dan dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan pemungutan retribusi pasar yaitu dengan terjun langsung kelapangan dan memberikan arahan tugas kepada petugas pemungut retribusi.

4. Pengawasan

Pengelolaan pemungutan retribusi pasar yang diterapkan oleh PD. Pasar Baruga yaitu pengawasan. Pengawasan dalam pelaksanaan pemungutan retribusi pasar merupakan hal yang sangat penting. Tidak dapat dipungkiri bahwa pengawasan memegang peranan penting sebagai upaya dalam meminimalisir ketimpangan-ketimpangan dalam pemungutan retribusi. Pengawasan merupakan proses pemantauan yang dilakukan sebagai langkah untuk mengetahui apakah kegiatan pelaksanaan di lapangan sudah sesuai dengan ketentuan. Dengan pengawasan yang baik maka ketimpangan-ketimpangan yang dapat mengurangi keberhasilan pemungutan retribusi pasar bisa diminimalisir.

Demikian halnya dalam pemungutan retribusi pasar di Kota Kendari yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah, untuk menghindari dan menekan seminimal mungkin terjadinya penyimpangan-penyimpangan serta kesalahan lainnya yang mungkin biasa terjadi. Sebab dalam pengelolaan retribusi pasar tanpa dilakukan pengawasan maka akan mengalami kesulitan dalam mengukur tingkat keberhasilan yang dilaksanakan oleh para petugas yang melaksanakan pemungutan retribusi pasar.

Bentuk pengawasan kedua yang diterapkan oleh PD Pasar Kota Kendari yaitu pengawasan tidak langsung. Adapun pengawasan tidak langsung dilakukan melalui laporan-laporan secara tertulis kepada atasan, dimana dengan laporan tertulis tersebut dapat dinilai sejauh manakah bawahan melaksanakan tugasnya sebagaimana mestinya. Sebagaimana yang dikemukakan oleh kepala PD. Pasar Kota Kendari yang mengatakan bahwa kami melakukan pengawasan dengan meminta laporan penerimaan retribusi kepada kepala UPTD Pasar perbulannya dan melakukan evaluasi pertiga bulan dan pertahunnya guna melihat letak kekurangan dalam proses penerimaan pemungutan retribusi pasar. Dan yang paling penting pengawasan terhadap karcin perbulannya. Beliau menambahkan bahwa kami dari PD. Pasar Kota Kendari secara rutin turun langsung untuk mengevaluasi kegiatan pemungutan retribusi tersebut sehingga kami tau apa saja kendala atau kekurangan yang dihadapi.

Pelaksanaan kegiatan pengawasan pada dasarnya diupayakan untuk meningkatkan penerimaan daerah khususnya pada retribusi pasar, sehingga dengan upaya mengefektifkan kegiatan pengawasan terhadap mekanisme pelaksanaan pemungutan retribusi pasar diharapkan mampu mencapai target yang ditetapkan pada setiap tahun anggaran.

Berdasarkan keseluruhan hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Kendari maupun UPTD Pasar untuk pengawasan langsung dan tidak langsung sudah sesuai rencana, tetapi harus lebih maksimal lagi harus ada penyesuaian data antara data yang dimiliki UPTD Pasar di masing-masing pasar dengan data di PD. Pasar Kota Kendari mengenai jumlah los/Kios, pelataran sehingga terdapat kecocokan dan dapat diperkirakan antara target dan pencapaian target atau realisasi.

C. Pandangan Ekonomi Dalam Pengelolaan Retribusi Pasar Dalam Meningkatkan PAD Selama Pandemi Covid 19

Dalam sisi perdagangan yang dilaksanakan oleh masyarakat sebagai yang sempurna menuntut segala sesuatu dilakukan secara baik terlebih lagi masalah keuangan tentunya harus dilakukan secara transparan agar semua pihak mengetahui dengan sebenar-benarnya tanpa ada yang harus ditutup-tutupi.

Dalam ekonomi tarif retribusi pasar adalah termasuk ijarah artinya pasar sebagai lahan bisnis milik umum yang berfungsi sosial, maka berarti bahwa kepentingan masyarakat banyak harus didahulukan dan pemerintah mempunyai hak mengelola dan memanfaatkan peluang bisnis tersebut karena termasuk kedalam aset negara. Perencanaan merupakan proses dari aktivitas manajemen yang sempurna, begitu pula dengan konsep tentang perencanaan hendaknya memperhatikan apa yang telah dikerjakan pada masalah untuk merencanakan sesuatu dimasa mendatang.

Perencanaan merupakan kegiatan awal dalam sebuah pekerjaan dalam bentuk memikirkan hal-hal yang terkait pekerjaan itu agar mendapat hasil yang optimal. PD. Pasar Kota Kendari tentunya memiliki perencanaan dalam meningkatkan penerimaan retribusi pasar seperti hasil wawancara yaitu penentuan target dan pendataan wajib retribusi. Berdasarkan hasil wawancara, PD. Pasar Kota Kendari menerapkan pengorganisasian guna meningkatkan penerimaan retribusi pasar lebih teroganisir dan teratur. Pengorganisasian yang diterapkan PD. Pasar KotaKendari yaitu dari sumber daya manusia yang dalam hal ini merupakan petugas pemungut retribusi pasar atau kolektor dlam setiap pasar telah ditetapkan antara tiga sampai lima orang sesuai dengan keadaan sehingga dengan terkoordinirnya jumlah kolektor dapat memudahkan pekerjaan, dan juga UPTD Pasar Baruga membagikan tugas terhadap masing-masing kolektor dan memberi standar kerja.

Organisasi dalam pandangan pemerintah bukan semata-mata wadah, melainkan lebih menekankan pada bagaimana sebuah pekerjaan dilakukan secara rapi. Organisasi lebih menekankan pengaturan mekanisme kerja. Pelaksanaan merupakan tindak lanjut dari perencanaan yang telah ditetapkan rencana yang telah disusun dengan baik oleh para perencana siap untuk dilaksanakan dan dijalankan oleh aparat pemungut dengan menggunakan segala sarana dan prasaran untuk merealisasikan rencana tersebut. Jadi pelaksanaan mencapai target yang telah direncanakan dengna jalan pelaksanaan pemungutan retribusi pasar tersebut.

Pelaksanaan retribusi pasar di Kota Kendari memiliki sistem yang memudahkan pedagang dalam membayar retribusi dan juga berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pedagang di pasar Baruga bahwa petugas kolektor bersikap sopan saat bertugas memungut retribusi pasar, hal ini sejalan dengan ajaran Islam yakni Islam mengajarkan untuk saling menghormati sesama. Tetapi dalam pelaksanaannya berdasarkan hasil wawancara dengan salah seorang pedagang bahwa petugas kolektor terkadang tidak memungut retribusi kepada pedagang yang mengenal kolektor atau memberikan potongan tarif dari yang tertera di karcis.

PD. Pasar Kota Kendari telah menjalankan fungsi pengawasan seperti yang diperintahkan dalam peraturan, PD. Pasar Kota Kendari menjalankan pengawasan dalam dua bentuk yaitu pengawasan langsung dan tidak langsung. Dalam penelitian ini menunjukkan bahwa pengawasan yang dilakukan dari keseluruhan hasil wawancara dapat disimpulkan bahwa untuk pengawasan yang dilakukan oleh PD. Pasar Kota Kendari yang dilkasanakan UPTD. Pasar Baruga maupun UPTD yang ada dalam Pasar di Kota Kendari. Pasar untuk pengawasan langsung dan tidak langsung harus lebih maksimal lagi agar retribusi pasar dapat mencapai target setiap tahunnya dengan dilakukan pengawasan dan evaluasi yang rutin. Dan antara semua pihak baik itu antara PD. Pasar Kota Kendari maupun UPTD Pasar lainnya (wajib retribusi) harus transparan, karena sesuai prinsip islam yaitu jujur dan adil.

V. KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan analisis tentang pengelolaan retribusi pasar dalam meningkatkan pendapatan asli daerah pada PD. Pasar Kota Kendari dalam perspektif ekonomi dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar di UPTD Pasar Baruga yang dibawah naungan PD. Pasar Kota Kendari berdasarkan hasil penelitian belum maksimal karena belum tercapainya target penerimaan retribusi pasar yang telah ditetapkan meskipun realisasi retribusi pasar di Kota Kendari meningkat setiap tahunnya. Hal ini disebabkan oleh berbagai kendala seperti dengan mewabahnya Pandemi Covid 19 serta kurang intensifnya pendapatan wajib retribusi, revitalisasi pasar, tunggakan pembayaran retribusi oleh pedagang karena berbagai alasan, hari raya dan faktor cuaca sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar tidak mencapai target.
2. Pengelolaan retribusi pasar yang diterapkan PD. Pasar Kota Kendari menurut pandangan sudut ekonomi yaitu dalam kegiatan retribusi pasar sesuai dengan keinginan Pemerintah Daerah yaitu petugas retribusi pasar berakhlakul karimah terhadap pedagang sebagai wajib retribusi. Petugas retribusi pasar bersikap sopan saat menagih retribusi terhadap pedagang. Masih banyak sistem pengelolaan retribusi pasar yang harus diperbaiki, sehingga dengan pengelolaan retribusi pasar yang sesuai dengan harapan pemerintah yang selanjutnya akan tercapainya tujuan mencapai target penerimaan retribusi pasar, sehingga dapat meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pasar.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan sehubungan dengan pengelolaan retribusi pasar di UPTD Pasar Baruga adalah sebagai berikut:

1. Pengelolaan retribusi pasar kedepannya harus lebih maksimal sehingga realisasi penerimaan retribusi pasar dapat mencapai target yang telah ditetapkan sehingga dapat lebih berkontribusi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah. Pendapatan wajib retribusi harus lebih intensif sehingga terdapat kecocokan data sehingga kedepannya dapat tercapai target retribusi pasar.
2. Pengelolaan retribusi pasar dimana dalam kegiatan pemungutan retribusi pasar semua petugas retribusi harus sesuai dengan harapan yang akan dicapai dalam PAD untuk lebih berakhlakul karimah saat menagih retribusi pasar terhadap pedagang sebagai wajib retribusi.

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2000, Menguat tabir hukum (suatu kajian filosofis dan sosiologi), gunung Agung Jakarta, 2002
- Ateng Syafrudin, otonomi daerah dan kepala daerah memasuki abad XXI, gaya media pratama, 2008
- Amrah Muslim, aspek-aspek hukum otonomi daerah, alumni bandung, 2008
- Amiroeddin syarif, Perundang-undangan dasar jenis dan teknik membuatnya, bina aksara, Jakarta, 2007
- Anonym, himpunan peraturan ekonomi daerah serta peraturan pelaksanaannya pustaka antara utama, Jakarta Pusat, 2001
-, tugas, fungsi dan peranannya dalam pemerintahan di daerah, departemen dalam negeri, Jakarta, 2009
- Andi Mallarangeng, Dkk otonomi daerah prospektif teoritis dan praktis, bihgraf publisng, yogyakarta, 2001.
- Abdul Halim, Muhammad Syam Kusufi, Akuntansi Sektor Publik: Akuntansi Keuangan Daerah, Jakarta: Salmeba Empat, 2012
- Adiwarman Karim, Ekonomi Makro Islam Edisi Ke-3, Jakarta: Rajawali Pers, 2010
- Ahmad Yani, Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Daerah Indonesia, Jakarta: Raja Grafindo, 2013
- Aries Djaenuri, Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Elemen-elemen Penting Hubungan Keuangan Pusat-Daerah, Bogor Galia Indonesia, 2012
- Bahar, Ujang. 2009. Otonomi Daerah Terhadap Pinjaman Luar Negeri. Kembangan Jakarta Barat.

- Bratakusuma, Supriadi. Deddy dan Solihin, Dadan. 2004. Otonomi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Cholid Narbuko dan Abu Achmadi, Metode Penelitian, Jakarta: Bumi Aksara, 2015
- Etta Mamang Sangadji Dan Sopiah, Metode Penelitian Praktik Dalam Penelitian Yogyakarta: Andi Offset, 2010
- Josep Riwo Kaho, Prospek Otonomi Daerah di Negara Indonesia, Jakarta: Rajawali Press, 2003
- Juliyansyah Noor, Metode Penelitian, (Jakarta: Kencana, 2011)
- Mardiasmo, Perpajakan Edisi Revisi Yogyakarta: Andi Offset, 2000
- Marihot Palaha Siahaan, Pajak Daerah Edisi Revisi, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2013